

Menanti Keadilan dari Kasus Imam Masykur



Teuku Kemal Fasya, antropolog Universitas Malikussaleh. Foto : Ist

Teuku Kemal Fasya

Apa yang dilakukan tiga oknum TNI ini bukan saja tidak patut dicontoh, tapi mewakili bayangan terburuk tentang pemuda, yang seharusnya menjadi harapan bangsa.

Ketiganya adalah pelaku yang terlibat langsung dari aksi penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa Imam Masykur, anak Bireuen yang memilih untuk memperbaiki hidup dengan merantau ke Ibukota. Sayang takdirnya tidak baik di sana dan harus meninggal secara tragis.

Praka RM bukan prajurit biasa. Ia adalah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sehari-hari ia bekerja di Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan. Praka HS bekerja di Direktorat Topografi TNI AD. Sedangkan J adalah anggota Kodam Iskandar Muda. Yang mempersatukan mereka dan korban adalah semuanya berasal dari Aceh! (“Kata Prabowo soal Kasus Anggota Paspampres dan TNI AD yang Aniaya Imam Masykur hingga Tewas”, *Kompas.com*, 31 Agustus 2023).

Ketiga pelaku yang telah menghilangkan nyawa seorang anak yang tidak mereka kenal, tidak ada dendam sebelumnya, dan tidak menjadi masalah personal. Masykur bisa jadi dambaan orang tuanya dan harapan sang kekasih yang bisa mengubah hidup dengan merantau. Ia disiksa, dibunuh, dan dibuang di sungai seperti sampah yang tak berguna. Kasus ini akhirnya memberikan citra buruk kepada institusi TNI, tulang punggung keamanan-pertahanan bangsa.

Video yang kemudian viral tentang penyiksaan sampai mati itu telah membangkitkan kemarahan publik, terutama di Aceh. Warga Aceh menyebut kasus ini seperti sebuah palung horor terkait pengalaman traumatik pada masa konflik. Apalagi akhirnya diketahui praktik penculikan dan penyiksaan itu memang menasar para pemuda Aceh yang sedang merantau di Jabodetabek.

Bukan kasus tunggal

Akhirnya kejadian yang menimpa Imam Maskur bukan lah kasus tunggal. Ketiga pelaku ternyata telah melakukan penyiksaan dan pemerasan kepada sejumlah pemuda Aceh di Jakarta Raya. Mereka melakukannya dengan kamufase aparat kepolisian.

Memang jika dilihat grafik transformasi pascaOrde Baru, TNI lebih maju selangkah dibandingkan Polri. Redefenisi, reposisi, dan reaktualisasi TNI setelah reformasi mengalami banyak perubahan. Peran militer tidak lagi masuk pada tatanan sipil, terutama pada aspek keamanan.

TNI seperti disebut di dalam UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (1) berperan “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” Artinya tindakan polisionil untuk memberikan rasa ciut kepada masyarakat sipil pun bukan lagi tugas militer di era demokrasi.

Tapi, tingkah tiga pemuda TNI ini telah memecahkan sumpah kristal Sapta Marga. “Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.” Sumpah patriot itu tidak bertenaga di pikiran dan kesadaran mereka. Air transformasi dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) itu harusnya melindungi rakyat dalam keamanan dan terbebas dari rasa takut.

Yang muncul malah kelebatan teror pada masa konflik, ketika pemuda Aceh yang keluar daerah dicurigai sebagai separatis atau para pengacau keamanan, sehingga layak diinterogasi hingga terbukti sebaliknya. Pada masa konflik metode falsifikasi ini dilakukan dengan penyiksaan hingga penghilangan paksa untuk memberikan penanda bagi publik Aceh lainnya. Namun, metode koersif para pemuda ini sama sekali tak berideologi. Mereka hanya menanggung keuntungan yang konon hingga Rp 900 juta.

Tanggal: 06 September 2023

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#),

Tags: [Unimal](#), [Akreditasi](#),